



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

G-20 DIHARAPKAN JADI MOMENTUM PERCEPATAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA

Niken Paramita Purwanto

Peneliti Muda

niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Jokowi telah mengumumkan tiga isu atau pilar yang akan dibahas Indonesia pada Presidensi G-20, yaitu Kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Ketiga isu tersebut akan mewujudkan tema utama Presidensi G-20 Indonesia, yaitu *Recover Together, Recover stronger* atau pulih bersama dan pulih lebih kuat.

Presidensi G-20 Indonesia mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia. Indonesia telah menargetkan pada tahun 2060 akan mencapai *carbon neutralities*, dan lebih cepat lagi dengan dukungan dari komunitas global.

Pada Forum Transisi Energi G-20 Presidensi Indonesia akan mengangkat tiga hal krusial untuk transisi energi berkelanjutan, yakni fokus pada akses energi, teknologi, dan pendanaan. Dengan tiga prioritas tersebut, forum transisi energi diharapkan memberikan hasil persidangan G-20 lebih konkret. Dengan urgensi tiga prioritas pula pada pertemuan tingkat energi nanti di Bali pada awal September 2022, forum transisi energi diharapkan dapat mencapai kesepakatan global untuk mengakselerasi transisi energi. Hal ini berguna untuk memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan serta transisi yang berkeadilan. Transisi energi adalah pekerjaan rumah kita semua. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara G-20 dan komunitas global.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam peluncuran Transisi Energi G-20 menuturkan diperlukan biaya yang sangat besar dalam transisi energi. Oleh karena itu, diperlukan peran investasi dan kontribusi dari sektor swasta, filantropi, dan bentuk-bentuk pendanaan inovatif, yang bisa mengafirmasi komitmen pendanaan US\$100 miliar per tahun dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Diperlukan komitmen global atau *global deal* dari tiap-tiap G-20 *leader* untuk bersama-sama menyepakati langkah-langkah konkret dalam rangka percepatan transisi energi. Hal ini penting karena banyak negara miskin dan berkembang tidak mampu membebani masyarakat mereka terutama pada masa pandemik ini.

Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan membutuhkan dana yang fantastis sebesar Rp3.500 triliun untuk menurunkan tiga perempat dari 41% komitmen penurunan emisi pada tahun 2030. Biaya tersebut, selain dipakai untuk memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), juga diperuntukkan untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Indonesia juga mulai mendorong industri yang lebih hijau. Contohnya, pemerintah telah melakukan *groundbreaking* Kawasan Industri Hijau Indonesia (KHI) yang terletak di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara (Kaltara), pada 21 Desember 2021.

Dalam melakukan transisi energi diusahakan agar dampaknya seminimal mungkin terhadap sosial ekonomi masyarakat, karena transisi energi akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, dan orientasi bisnis pada suatu negara. Sehingga transisi ini harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat, yang akan dibangun pada forum G-20 Indonesia di mana negara yang memiliki beban berat harus dibantu dan negara yang sudah siap bisa berjalan sambil membantu negara yang belum mampu.

Atensi DPR

Salah satu prioritas besar dalam proses transisi energi dengan memanfaatkan momentum Presidensi G-20 Indonesia dan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri dalam rangka mendorong pemanfaatan energi bersih adalah dengan melakukan fungsi legislasi dengan mendorong pemerintah untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini agar dapat segera menjadi undang-undang sehingga dapat segera memberikan stimulus terhadap proses transisi energi, mengingat juga perlu adanya terobosan agar tercapainya target 23 persen bauran energi nasional kita dari EBT pada tahun 2025 dan komitmen Indonesia untuk mencapai *carbon neutral* pada tahun 2060 atau lebih cepat, bisa tercapai.

Sumber

Media Indonesia, 14 Februari 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Rasbin
Edmira Rivani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.